

## PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 18 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 13 Mei 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah dengan nomor Pengadaan RFQ: 55762, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocedurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan meliputi Pengawasan Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Utama (GKU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah (KPwBI Sulteng) dengan tahapan sebagai berikut:
  1. Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor Sementara (GKS)
    - a) Tahap Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan
    - b) Tahap Pengawasan Pemeliharaan Pekerjaan Fisik,
  2. Pekerjaan MK Gedung Kantor Utama (GKU)
    - a) Tahap Pendampingan dan Review Dokumen Perancangan;
    - b) Tahap Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Fisik;
    - c) Tahap Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan
    - d) Tahap Pengawasan Pemeliharaan Pekerjaan Fisik.

Selengkapnya sebagaimana Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp8.120.134.529,80 (delapan miliar seratus dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen)** sudah termasuk PPN (12% x 11/12).

- III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan berbentuk
  - a) Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Republik Indonesia;
  - b) Badan Usaha Asing yang melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Nasional (*joint venture*/PT PMA); atau
  - c) Konsorsium antara:
    - i. Badan Usaha Nasional dengan Badan Usaha Nasional; atau
    - ii. Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Nasional,yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama;
2. Terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement*;
3. Perusahaan Jasa Pelaksana Manajemen Konstruksi terkait Konstruksi Bangunan dengan syarat memiliki sertifikasi yang telah diakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagai berikut:

Klasifikasi	Kode Klasifikasi	Kualifikasi
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

4. Perusahaan memiliki pengalaman yang telah selesai dalam 5 (lima) tahun terakhir (Mei 2021 – Mei 2026) untuk pekerjaan jasa Manajemen Konstruksi pembangunan atau renovasi gedung dan/atau kawasan perkantoran/hunian *flat*/apartemen bertingkat minimal 4 lantai dengan nilai pekerjaan Manajemen Konstruksi sejumlah Rp4.100.000.000,00 dalam 1 (satu) kontrak. Pengalaman dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak/*Purchase Order* (PO), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Pekerjaan atau dokumen lainnya dari Pemberi Tugas yang menyatakan pekerjaan telah selesai serta dokumen pendukung yang menjelaskan jumlah lantai;
5. Memiliki Laporan Keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP);
7. Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam pada INAPROC dengan status tayang;
8. Dalam hal memiliki pengalaman bekerja di Bank Indonesia, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak memiliki penilaian kinerja kurang baik untuk pekerjaan MK/Pengawas;
9. Membuat Surat Pernyataan:
  - a) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b) Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dapat mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia;
  - c) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
  - d) Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - e) Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini; dan
  - f) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.
10. Dalam hal calon peserta berupa konsorsium:

- a) Persyaratan sebagaimana angka 3 dipenuhi oleh minimal *Lead Firm* Konsorsium;
  - b) Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari 3 (tiga) Perusahaan;
  - c) Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian kerja sama pembentukan Konsorsium yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium tersebut; dan
  - d) Persyaratan sebagaimana angka 2, 5, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium.
- IV. Persyaratan pendaftaran:
1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
  2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui <http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx> atau <https://eprocurement.bi.go.id>.
  3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal 18 s.d. 25 Mei 2026 melalui <https://eprocurement.bi.go.id>.
  4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
  5. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: [Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id](mailto:Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id).
- V. Komitmen Integritas Pengadaan:
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
  2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
  3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
  4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui [https://www.bi.go.id/wbsbi/add\\_wbs2.aspx](https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx).



Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER

## PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 18 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 13 Mei 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah dengan nomor Pengadaan RFQ: 55762, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurment.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan meliputi Pengawasan Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Utama (GKU) KPwBI Sulteng dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Pengawasan Gedung Kantor Sementara (GKS)
    - a) Tahap Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan
    - b) Tahap Pengawasan Pemeliharaan Pekerjaan Fisik,
  - b. Pekerjaan MK Gedung Kantor Utama (GKU)
    - a) Tahap Pendampingan dan Review Dokumen Perancangan;
    - b) Tahap Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Fisik;
    - c) Tahap Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan
    - d) Tahap Pengawasan Pemeliharaan Pekerjaan Fisik.

Selengkapnya sebagaimana Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- II. Pagu anggaran sejumlah **Rp8.120.134.529,80 (delapan miliar seratus dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh sen)** sudah termasuk PPN (12% x 11/12).

- III. Persyaratan Peserta Tender:

1. Perusahaan berbentuk
  - a) Badan Usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Republik Indonesia;
  - b) Badan Usaha Asing yang melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Nasional (*joint venture*/PT PMA); atau
  - c) Konsorsium antara:
    - i. Badan Usaha Nasional dengan Badan Usaha Nasional; atau
    - ii. Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Nasional,yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama;
2. Terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement*;
3. Perusahaan Jasa Pelaksana Manajemen Konstruksi terkait Konstruksi Bangunan dengan syarat memiliki sertifikasi yang telah diakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang masih berlaku sebagai berikut:

Klasifikasi	Kode Klasifikasi	Kualifikasi
Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, maka harus menyampaikan tanda terima/bukti perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

4. Perusahaan memiliki pengalaman yang telah selesai dalam 5 (lima) tahun terakhir (Mei 2021 – Mei 2026) untuk pekerjaan jasa Manajemen Konstruksi pembangunan atau renovasi gedung dan/atau kawasan perkantoran/hunian *flat*/apartemen bertingkat minimal 4 lantai dengan nilai pekerjaan Manajemen Konstruksi sejumlah Rp4.100.000.000,00 dalam 1 (satu) kontrak. Pengalaman dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak/*Purchase Order* (PO), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Pekerjaan atau dokumen lainnya dari Pemberi Tugas yang menyatakan pekerjaan telah selesai serta dokumen pendukung yang menjelaskan jumlah lantai;
5. Memiliki Laporan Keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian;
6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP);
7. Perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam pada INAPROC dengan status tayang;
8. Dalam hal memiliki pengalaman bekerja di Bank Indonesia, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak memiliki penilaian kinerja kurang baik untuk pekerjaan MK/Pengawas;
9. Membuat Surat Pernyataan:
  - a) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
  - b) Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dapat mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia;
  - c) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
  - d) Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
  - e) Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini; dan
  - f) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

10. Dalam hal calon peserta berupa konsorsium:
  - a) Persyaratan sebagaimana angka 3 dipenuhi oleh minimal *Lead Firm* Konsorsium;
  - b) Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari 3 (tiga) Perusahaan;
  - c) Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian kerja sama pembentukan Konsorsium yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium tersebut; dan
  - d) Persyaratan sebagaimana angka 2, 5, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota konsorsium.
- IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal 18 s.d. 25 Mei 2026, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri dari:
  1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggujawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00.
  2. *Scan* sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan/atau lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi, yaitu dengan kualifikasi Besar (B) dan klasifikasi/sub klasifikasi (sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021) sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.3.
  3. *Scan* bukti Perusahaan memiliki pengalaman Perusahaan dalam pekerjaan manajemen konstruksi sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4.
  4. *Scan* Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh KAP dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
  5. *Scan* bukti kewajiban perpajakan Tahun 2024 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak (DJP).
  6. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggujawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
    - a) Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
    - b) Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
    - c) Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
    - d) Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
    - e) Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan Peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini; dan
    - f) Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.Seluruh pernyataan dari huruf a. s.d. f. di atas dinyatakan dalam satu Surat Pernyataan.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.
- VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: [Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id](mailto:Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id).
- VII. Komitmen Integritas Pengadaan
  1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
  2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
  3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
  4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui [https://www.bi.go.id/wbsbi/add\\_wbs2.aspx](https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx).

PANITIA TENDER

**KOP PERUSAHAAN  
SURAT PERMOHONAN**

No. .... / ..... / .....

Kepada :

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah

---

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. .... tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penangguag Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. ....

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses Tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, .....  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
------------------------

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penangguag  
Jawab Perusahaan dan cap  
perusahaan

**KOP PERUSAHAAN**  
**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. ....

Dalam rangka mengikuti Tender Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Gedung Kantor Sementara (GKS) dan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
5. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan peserta lain yang ikut mendaftar pada Pengadaan ini; dan
6. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, .....  
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
------------------------

(.....)  
Tanda-tangan Direktur Utama/  
Direktur/ Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan dan cap  
perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.